

# Jurnalisme Warga sebagai *Fifth Estate*: Potret Kaum Marginal di Bale Bengong

Irawati Diah Astuti

Universitas Indonesia

Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia

[ira.astuti@gmail.com](mailto:ira.astuti@gmail.com)

## Abstrak

Media cenderung menjadikan kelompok marginal sebagai objek pemberitaan yang mengedepankan sensasi. Masalah mereka baru tersentuh ketika berkaitan dengan tragedi karena media lebih memberi tempat bagi narasumber elit seperti para pejabat, aparat, dan tokoh dari kelompok mayoritas. Dengan mengabaikan berita-berita seputar masyarakat marginal, media pun kian menjauh dari fungsi utamanya sebagai pilar keempat demokrasi. Tak heran jika kemudian masyarakat memiliki krisis kepercayaan kepada media massa untuk isu-isu kaum marginal. Mereka lantas mencari cara untuk menciptakan ruang-ruang baru untuk menyuarakan masalah-masalah mengenai kaum marginal, salah satunya adalah melalui jurnalisme warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kehadiran jurnalisme warga sebagai perwujudan *fifth estate*, sebuah konsep dari William H. Dutton yang menyebutkan bahwa media sosial dan internet berfungsi menghadirkan bentuk akuntabilitas demokrasi baru. Pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus dan metode pengumpulan data berupa wawancara, analisis isi, dan studi literatur. Subjek penelitian di sini adalah portal berita Bale Bengong yang fokus pada isu seputar masyarakat Bali dengan pemimpin redaksi Bale Bengong sebagai informan. Hasil penelitian menemukan bahwa Bale Bengong menjalankan kelima strategi dalam *fifth estate* dalam memotret masyarakat marginal yakni 1) *searching*, 2) *creating*, 3) *distributing/leaking*, 4) *networking*, dan 5) *collective intelligence*. Untuk menjaga akuntabilitas sebagai media yang mengusung konsep jurnalisme warga, Bale Bengong tetap menghadirkan jurnalis profesional sebagai *gatekeeper* berita.

**Kata-kata Kunci:** *bale bengong; fifth estate; jurnalisme warga; kaum marginal; media digital*

Diterima: 20-06-2022

Disetujui: 24-12-2022

Dipublikasikan: 31-12-2022

# Citizen Journalism as The Fifth Estate: Marginalized People in Bale Bengong

## Abstract

The media tends to make marginalized people as objects of news that puts forward sensation. They are only highlighted in the media when it comes to tragedy because the media gives more space to elite sources such as the government officials and figures from the majority group. By ignoring news about marginalized communities, the media is moving away from its main function as the fourth estate. It is not surprising then that people have a trust issue in the mass media, especially for issues of the marginalized. They look for ways to create new spaces to voice problems regarding these groups, one of which is through citizen journalism.

*This study analyzes the presence of citizen journalism as the embodiment of the fifth estate, a concept from William H. Dutton stating that the internet serve to present a new form of democratic accountability. It uses qualitative approach with case study as the research strategies and data collection methods in the form of interviews, content analysis, and literature studies. The subject of this research is the Bale Bengong news portal which focuses on issues surrounding Balinese society with editor-in-chief Bale Bengong as the informant. The results of the study found that Bale Bengong carried out all five strategies in the fifth estate in portraying marginalized communities, namely 1) searching, 2) creating, 3) distributing/leaking, 4) networking, and 5) collective intelligence. To maintain accountability as a media that carries the concept of citizen journalism, Bale Bengong employs professional journalists as news gatekeepers.*

**Keywords:** *bale bengong, citizen journalism, digital media, fifth estate, marginalized people*

## PENDAHULUAN

Media massa kerap mengabaikan isu seputar kaum marginal. Isu-isu mengenai masyarakat yang terpinggirkan ini jarang menjadi *headline* atau topik utama di media massa karena dinilai kurang menarik. Masalah kelompok marginal baru tersentuh ketika berkaitan dengan tragedi (Puspitasari, 2016). Di era digital saat ini, kondisinya menjadi lebih parah. Di saat media semakin penting bagi publik, terutama media daring dan media sosial, media arus utama justru banyak yang belum siap untuk memegang teguh prinsip-prinsip jurnalistik dalam mengabarkan isu-isu keberagaman yang melibatkan kaum marginal. Akibatnya, kelompok-kelompok marginal semakin terdesak di ruang digital karena media daring dan media sosial menjadi kurang aman bagi mereka (Sejuk, 2021). Banjir informasi yang disebabkan produksi berita setiap detiknya di rezim media daring makin menjauhkan peran pers terhadap posisi idealnya. Jurnalis sebagai entitas penting dalam institusi pers seolah hanya berperan sebagai penampung pernyataan narasumber, tanpa pemahaman mendalam (Puspitasari, 2016).

Media daring kini lebih banyak memfokuskan diri pada berita-berita bombastis maupun hiburan demi meningkatkan jumlah klik dan pembaca. Hal ini terkonfirmasi dari riset Remotivi yang menemukan fakta bahwa media cenderung menjadikan kelompok minoritas sebagai objek pemberitaan yang mengedepankan sensasi (Heychael et al., 2021).

Dalam riset berupa analisis konten pemberitaan yang dilakukan terhadap media daring dan televisi tersebut, disebutkan bahwa liputan isu keberagaman tidak banyak mewakili suara-suara kelompok marginal. Media lebih memberi tempat bagi narasumber elit seperti para pejabat, aparat, dan tokoh agama yang mewakili organisasi-organisasi keagamaan dari kelompok mayoritas (Heychael et al., 2021). Teknologi yang berkembang pesat di tengah industri pers malah membuat media terjebak menjadi suara bagi kelompok dominan. Padahal, dengan fungsi kontrol terhadap kebijakan, tanggung jawab moral media sebagai penyambung lidah masyarakat marginal seharusnya bisa lebih kuat (Puspitasari, 2016).

Inklusifitas media sangat penting untuk mendorong kesetaraan akses

informasi serta penghilangan diskriminasi terhadap kelompok marginal (Gunadha & Bhayangkara, 2020). Dengan mengabaikan berita-berita seputar masyarakat marginal, media pun kian menjauh dari fungsi utamanya sebagai pilar keempat demokrasi. Pemberitaan yang lebih fokus pada isu bombastis maupun stigma dan stereotip terhadap masyarakat marginal akan kian menormalisasi peminggiran kelompok tersebut (Thaniago, 2020).

Dengan fakta-fakta seperti ini, tidak heran jika masyarakat memiliki krisis kepercayaan terhadap media massa terkait pemberitaan kaum marginal. Sebab, meski era digital disebut-sebut mampu membuka peluang baru untuk pluralitas, kenyataannya tidaklah seperti itu. Organisasi media yang mapan tetap memainkan peran yang kuat dalam membentuk bagaimana masyarakat memandang ketidaksetaraan sosial, dan representasi mereka akan kelompok-kelompok terpinggirkan terus mendominasi wacana publik. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan lantas mencari cara untuk menciptakan ruang-ruang baru untuk mengartikulasikan perjuangan fisik dan diskursif mereka untuk meruntuhkan hambatan sosial. Salah satunya adalah melalui jurnalisme warga (Luce et al., 2017).

Jurnalisme warga di Indonesia umumnya diterjemahkan dalam format media sosial seperti Twitter dan Facebook, blog, maupun *user generated content*. Namun, ada pula beberapa media alternatif yang berbasis jurnalisme warga di Tanah Air seperti layaknya Oh My News di Korea. Salah satunya adalah portal berita Bale Bengong ([www.balebengong.id](http://www.balebengong.id)) yang fokus pada isu-isu di Pulau Bali.

Dengan berbasiskan jurnalisme warga, Bale Bengong menghadirkan berita dan isu dari kacamata warga Bali. Para warga diajak untuk tidak hanya sekadar menjadi objek berita melainkan juga menjadi subjek berita yang menceritakan segala sesuatu dari sudut pandang mereka sendiri (Bale Bengong, 2007). Redaksi membebaskan warga untuk menulis mengenai berbagai isu, mulai dari isu komunitas, isu lingkungan hingga isu personal. Isu-isu seputar kaum marginal rutin dihadirkan Bale Bengong berupa berita kiriman dari masyarakat maupun artikel yang ditulis oleh tim redaksi sendiri.

Dari situ kemudian timbul pertanyaan. Bagaimana jurnalisme warga hadir sebagai bagian dari konsep *fifth estate* di Bale Bengong? Diketahui, *fifth estate* merupakan konsep yang menyebutkan bahwa media sosial dan internet berfungsi menghadirkan bentuk akuntabilitas demokrasi baru (Dutton, 2009). Untuk mengetahuinya, penelitian kali ini akan menganalisis pemberitaan tentang masyarakat marginal di Bale Bengong dengan metode analisis isi, wawancara, dan studi pustaka.

## KAJIAN PUSTAKA

### Jurnalisme Warga

Istilah jurnalisme warga sudah ada sejak akhir 1980-an dari Amerika Serikat. Kemunculan jurnalisme sipil didasari keterasingan warga yang disebabkan oleh cara pembuatan berita yang otoritatif dan sepihak serta konsentrasi kepemilikan media (Kim & Kim, 2017). Pada dekade 1990-an, istilah jurnalisme warga mengungkapkan minat pers dalam keprihatinan warga. Akibatnya, ruang media terbuka bagi warga

untuk mendiskusikan masalah mereka di depan umum. Untuk itu, bisa dikatakan bahwa jurnalisme warga merupakan praktik jurnalistik dalam institusi media yang bertujuan untuk menciptakan dialog dengan warga karena mereka percaya pada kebebasan berpendapat dan berekspresi serta peran mereka dalam melindungi dan melestarikan nilai-nilai ini (Setoutah et al., 2021).

Internet adalah terobosan untuk mengatasi batasan pada konsep jurnalisme warga. Masyarakat kini mampu memproduksi informasi berita langsung secara daring. Allan (2003) menyebutkan bahwa jurnalisme warga daring seperti liputan yang diproduksi warga telah muncul sejak serangan 11 September 2001. Warga turun ke jalan dan melaporkan berita langsung melalui internet. Sejak itu, warga dan partisipasi mereka dalam memproduksi berita menjadi penting dalam bidang jurnalisme.

Pada tahun 2000, Oh My News di Korea mempopulerkan jurnalisme warga dalam format media massa arus utama. Oh My News adalah surat kabar internet yang diterbitkan pada Februari 2000 di Korea dengan membawa sistem jurnalisme warga, sehingga siapa pun yang terdaftar di situs tersebut dapat menulis artikel. Oh My News merupakan salah satu kasus sukses di antara surat kabar internet Korea yang berhasil mengeksport sistem tersebut ke AS, Jepang, dan beberapa negara lain. Masyarakat pun amat antusias mengirimkan berita ke Oh My News yang terbukti dari peningkatan luar biasa pada jumlah penulis yang terdaftar, dari 27 orang pada tahun pertama menjadi 83.000 orang pada 2016. Secara total,

jurnalisme warga di Oh My News ini telah menghasilkan sekitar 852.000 artikel sejak *website* itu dimulai (Kim & Kim, 2017). Oh My News mengandalkan masyarakat untuk mengirim dan menuliskan berita sesuai perspektif masing-masing. Sebelum dimuat, tetap ada editor yang berfungsi sebagai *gatekeeper* berita yang hadir agar tidak terjerumus pada berita palsu maupun fitnah dan *hoax*.

Jurnalisme warga yang muncul bersama dengan jurnalisme partisipatif kemudian menjadi objek yang kerap diteliti oleh para sarjana jurnalistik. Umumnya, para sarjana dan peneliti mendefinisikan jurnalisme warga sebagai berita yang dihasilkan oleh orang-orang yang tidak terlatih dalam dunia jurnalisme tanpa bantuan jurnalis profesional. Beberapa peneliti lainnya seperti Holt & Karlsson (2015) dan Karlsson & Holt (2014) menggunakan deskripsi jurnalisme warga berikut untuk membedakannya dari jurnalisme partisipatif: “Di mana orang-orang bertanggung jawab untuk mengumpulkan konten, melihat, memproduksi dan menerbitkan produk berita, saya sebut jurnalisme warga. Dalam model ini, para profesional tidak terlibat sama sekali (kecuali dalam kapasitas warga negara tetapi tidak sebagai karyawan yang dibayar)” (Nip, 2006).

Peneliti seperti Mortensen (2011) menyebut adanya ketidakjelasan dan konseptualisasi dalam istilah jurnalisme warga sementara Cottle (2009) berpendapat bahwa nama lain dari jurnalisme warga sering gagal untuk menangkap fenomena tersebut secara memadai. Misalnya, istilah konten buatan pengguna atau *user generated content* yang sering digunakan

oleh media berita profesional pada konten-konten video, foto, dan interaksi yang diproduksi masyarakat awam. Istilah tersebut menciptakan pandangan yang terhambat dan kepemilikan jurnalisme warga sehingga menghilangkan potensi kebajikan sipilnya. Jurnalisme warga tetap menjadi istilah yang kuat untuk fenomena ini, meskipun kurang tepat dan masih membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut, karena hubungannya dengan partisipasi warga yang berpotensi aktif dalam masyarakat (Cottle, 2009).

Senada dengan itu, Örnebring (2013) berpendapat bahwa terdapat persamaan umum dari istilah jurnalisme warga, yakni istilah yang mengacu pada berita yang diproduksi secara amatir sebagai lawan dari jurnalis profesional. Meski banyak peneliti secara eksplisit mendefinisikan jurnalisme warga dengan cara ini, beberapa peneliti lain tidak memberikan definisi yang jelas. Namun, mereka telah mengaitkan jurnalisme warga dengan warga biasa yang tidak terlatih, berbeda dengan jurnalis profesional (Larsson, 2014; Semati & Brookey, 2014). Bentuk jurnalisme warga yang paling banyak dipelajari adalah blog, situs web, dan unggahan di media sosial. Perbedaan utama bagi para peneliti jurnalisme warga adalah kurangnya keterlibatan jurnalis profesional (Abbott, 2017).

Saat ini, istilah jurnalisme warga masih terus diperdebatkan, terutama oleh para jurnalis profesional. Ada yang menyebut jurnalisme partisipatif maupun jurnalisme berjejaring. Namun, tindakan masyarakat awam yang membuat konten media berisikan informasi berita telah menjadi praktik yang diterima secara

umum di seluruh dunia, dipandang oleh jutaan orang sebagai berita alternatif, otentik atau bahkan hanya sebagai praktik sehari-hari (Holton et al., 2013).

Demikian pula, fenomena ini kini begitu lekat dengan cara kerja media berita profesional sehingga sulit membayangkan jurnalisme warga lenyap. Wall (2015) menyebutkan bahwa jurnalisme hanyalah satu set praktik dalam jaringan aktivitas yang membentuk masyarakat. Jurnalisme warga mencerminkan pergeseran paradigma yang lebih luas menuju lebih banyak partisipasi oleh orang-orang yang kurang terlatih di banyak bidang masyarakat.

### Fifth Estate

Sejak abad ke-18, pers kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi atau *fourth estate*. Artinya, pers memiliki kapasitas untuk mengadvokasi maupun mbingkai isu-isu politik kepada publik. Istilah ini berasal dari konsep di Eropa tentang tiga pilar di dunia, yakni pemuka agama, bangsawan, dan rakyat jelata, yang kemudian diadopsi ke dalam konsep tiga pilar demokrasi yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pers menjadi pilar keempat untuk melengkapi ketiga pilar tadi dalam konsep negara demokrasi, sesuai yang diucapkan politisi Inggris, Edmund Burke, dalam sebuah debat parlemen di Inggris pada 1787 (Schultz, 1998).

Media bertugas untuk mengawasi pemerintah dan para pejabat negara dengan fungsinya menginvestigasi dan melaporkan berita-berita terkini. Peran jurnalisme sebagai pilar keempat sangatlah penting sehingga berbagai negara termasuk

Amerika Serikat, memberikan keistimewaan dan perlindungan kepada para pekerja media, seperti dalam Amandemen Pertama dalam konstitusi AS (Felle, 2016). Hak serupa juga dijamin dalam European Convention on Human Rights (Council, 1950) dan the UN Convention on Civil and Political Rights.

Di era digital, internet tidak hanya sekadar menjadi sarana untuk mencari informasi, berkomunikasi dan bersilaturahmi. Kini, internet bahkan juga disebut-sebut sebagai pilar kelima demokrasi, atau *fifth estate*. Hal itu diungkapkan oleh William H Dutton (2009) dalam tulisannya "The Fifth Estate Emerging through the Network of Networks". Dutton menyebutkan bahwa internet menghadirkan bentuk akuntabilitas demokrasi baru, dan untuk menjelaskannya, ia memberikan berbagai latar belakang kepada perkembangan konsep *fifth estate* (Uwalaka & Watkins, 2018).

Menurut Dutton, konsep *fifth estate* muncul karena meningkatnya penggunaan internet dan teknologi digital yang menciptakan ruang bagi individu dengan cara yang memungkinkan sumber akuntabilitas baru dalam pemerintahan, politik, dan sektor lainnya. Dutton berargumentasi bahwa konsep *fifth estate* dapat menantang pengaruh basis otoritas institusional lain yang lebih mapan. Dia membahas bahwa pendekatan tata kelola fenomena sosial dan politik baru ini dapat memelihara potensi *fifth estate* untuk mendukung vitalitas masyarakat demokratis liberal. Ia juga menyebutkan bahwa *fifth estate* akan muncul melalui "jejaring dari jaringan" (Dutton, 2009).

Secara singkat, konsep *fifth estate* adalah perpanjangan dari konsep *fourth estate*, di mana pers diberdayakan oleh jangkauan dan sumber dayanya untuk meminta pertanggungjawaban institusi. Namun, *fifth estate* berbeda dari *fourth estate* karena fungsi *fifth estate* tersebar di antara lebih banyak individu, tidak hanya pada jurnalis profesional saja. Selain itu, dalam konsep *fifth estate*, pers juga menjadi target akuntabilitas publik (Robertson et al., 2019). Perspektif *fifth estate* ini melihat warganet sebagai individu berjejaring yang dimungkinkan oleh keterjangkauan internet untuk berkomunikasi satu sama lain, mengatur, serta mencari, berbagi, dan mempublikasikan informasi, dengan cara yang dapat menantang dan mempromosikan akuntabilitas lembaga seperti pemerintah, politisi, dan pers (Dutton, 2015).

Beberapa peristiwa dan kasus bisa digunakan untuk menunjang konsep *fifth estate* yang disebutkan Dutton (2009). *Pertama*, kasus penangkapan yang berakhir dengan hilangnya nyawa George Floyd di tangan polisi Amerika Serikat. Kasus itu berawal dari penangkapan Floyd yang direkam oleh seorang remaja berusia 17 tahun. Video itu kemudian ia unggah di Facebook dan viral di media sosial hingga berujung pada penangkapan dan vonis bersalah kepada para petugas polisi yang menghabisi nyawa Floyd saat menangkapnya. *Kedua*, Greta Thurnbeg dan aktivisme sosial lingkungannya yang mendunia. *Ketiga*, gerakan #MeToo yang mampu mengangkat isu kekerasan seksual yang selama ini jarang dihadirkan di media konvensional. *Terakhir*, fenomena Paul Haynes yang berhasil menemukan

pembunuh berantai dengan julukan The Golden State Killer, dengan bermodalkan riset 10-15 jam per hari melalui sumber-sumber daring dan media sosial dari kamarnya. Berbagai penelitian yang ia lakukan kemudian mendorong FBI untuk menginvestigasi dengan menggabungkan sumber daring ala Haynes dan bukti-bukti yang mereka miliki.

Meski begitu, Dutton menyadari bahwa terdapat ancaman terhadap konsep *fifth estate* yang ia usung ini, terkait dengan pilar-pilar lainnya. Peran internet dalam individu berjejaring merupakan pedang bermata dua. Internet membuka gerbang bagi berbagai aspek dunia luar yang bermanfaat bagi penggunanya. Namun internet juga mampu menyebabkan kerugian bagi penggunanya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Internet dapat digunakan untuk membangun kehadiran jaringan yang kuat sebagai sumber daya untuk merekrut, mendanai, dan memperbesar citra gerakan sosial dan politik dengan tujuan positif sekaligus kelompok ekstremis yang penuh dengan kekerasan dan kebencian. Konsep *fifth estate* dapat merusak institusi yang berharga, atau menjadi kekuatan konservatif dengan membangun lebih banyak kontrol dan keseimbangan. Internet dapat memberikan kekuasaan kepada yang jahat maupun yang baik (Dutton, 2009).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan kualitatif. Pendekatan konstruktivis bertujuan untuk memahami dunia pengalaman manusia (Cohen & Manion, 1994) dan menunjukkan bahwa realitas

dibangun secara sosial (Mertens, 2019). Dengan pendekatan ini, peneliti lebih banyak mengandalkan perspektif partisipan tentang situasi yang sedang dipelajari (Creswell, 2003) dan mengakui dampak penelitian dari latar belakang dan pengalaman mereka sendiri. Pendekatan konstruktivis umumnya tidak memulai dengan sebuah teori namun menghasilkan atau secara induktif mengembangkan teori atau pola makna (Creswell, 2003) selama proses penelitian. Peneliti konstruktivis biasanya mengandalkan metode dan analisis pengumpulan data kualitatif atau metode campuran yakni kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif.

Subjek penelitian adalah *website* Bale Bengong. Proses pengumpulan data penelitian menggunakan tiga teknik. *Pertama*, wawancara dengan informan, yaitu Pemimpin Redaksi Bale Bengong, Luh De Suriyani atau Luh De. Dikarenakan lokasi peneliti yang berbeda kota dengan informan, maka proses wawancara dilakukan dengan menggunakan *email*.

*Kedua*, analisis isi konten [www.balebengong.id](http://www.balebengong.id). *Ketiga*, studi literatur. Peneliti melakukan studi literatur mengenai konsep jurnalisme warga dan *fifth estate* sesuai yang disebutkan Dutton (2009) dari penelitian-penelitian terdahulu dan mengaitkannya dengan fenomena yang menjadi studi kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jurnalisme Warga dan Kaum Marginal

Sejak awal pendiriannya pada 2007, Bale Bengong memang memilih format jurnalisme warga. Bahkan, Bale Bengong memiliki slogan yang menyebutkan bahwa warga tidak hanya menjadi objek

berita tetapi sekaligus subjek. Portal ini dikelola oleh Bali Blogger Community dan Skola Institute dengan tujuan mendorong masyarakat Bali untuk mau berbagi cerita mengenai apapun yang mereka alami, lihat, dan observasi (Bale Bengong, 2007). Oleh karena itu, konten di Bale Bengong sangat beragam dengan perspektif berbeda-beda, sesuai penulisnya. Apalagi memang Bale Bengong tidak membatasi kontributornya untuk menulis mengenai isu-isu tertentu saja.

*Jurnalisme warga mendorong hadirnya informasi langsung dari sudut pandang warga dengan tetap mengutamakan fakta. Media arus utama itu cenderung elite, dengan sumber berita yang lebih banyak bersumber dari polisi, anggota DPR, dan pemerintah. Di sisi lain media pun cenderung lebih suka sesuatu yang bersifat konflik atau tragis. Padahal warga kan sumber informasi yang luar biasa. Banyak masalah sehari-hari yang sepertinya sepele, tapi perlu diketahui orang lain. Nah, di BaleBengong, semua orang bisa menulis sendiri masalah yang menurut mereka menarik (Luh De, wawancara melalui email, 29 Mei 2022).*

Isu-isu seputar kaum marginal yang jarang ditampilkan di media massa, cukup dominan dihadirkan di sini. Di antaranya adalah Perempuan. Jika kita mencari berita di Bale Bengong dengan kata kunci “perempuan”, akan didapatkan 792 berita dengan beragam tema, penulis, dan sudut pandang. Namun, dari 15 berita pertama saja sudah dapat dilihat bahwa isu tentang perempuan marginal mendominasi konten Bale Bengong. Isu-isu yang dihadirkan amat beragam, mulai dari perempuan

pengungsi, perempuan korban kekerasan rumah tangga, perempuan dengan HIV/AIDS hingga perempuan dengan gangguan mental.

**Tabel 1. Contoh Isu Perempuan di Bale Bengong**

No	Judul	Terbit
1	Kisah Perempuan Pecandu di Tengah Pandemi	2/11/ 2020
2	Perempuan Roketenda dalam Setapak Digital	13/5/2022
3	Benarkah Ada Angin Segar Perlindungan Perempuan?	25/5/2022
4	Kami Bersuara Kami Mendengar dari Perempuan Terdampak Skizofrenia	11/5/2020

Sumber: dokumen peneliti

Kedua adalah bahasan terkait disabilitas. Jika kita mencari berita di Bale Bengong dengan kata kunci “disabilitas”, akan didapatkan 51 berita dengan beragam tema, penulis, dan sudut pandang. Isu-isu yang diusung cukup beragam, mulai dari ODGJ, perempuan dengan disabilitas, hingga pementasan seni yang menampilkan para difabel. Bahkan, terdapat beberapa artikel yang ditulis sendiri oleh kaum difabel ini, sehingga lebih nyata dan personal karena menampilkan sudut mereka sendiri, bukan orang lain.

**Tabel 2. Contoh Isu Disabilitas di Bale Bengong**

No	Judul	Terbit
1	Pisau Bermata Dua di Tangan ODGJ	1/5/2022
2	Perempuan Disabilitas Berkebun di Tengah Pandemi	28/5/2020



3	Pentas Bersama Disabilitas di Bawah Pohon Beringin	16/6/2019
4	Aku Dede, Ini Ceritaku dengan Difabel Sensorik Netra	11/12/2021

Sumber: dokumen peneliti

Bahasan lain yang ditemukan yakni terkait petani. Di Indonesia, petani dan juga nelayan merupakan bagian dari kaum marginal yang kerap terpinggirkan di tengah masyarakat dan media massa. Namun, Bale Bengong cukup sering menghadirkan berita yang menampilkan isu tentang petani. Jika mencari dengan kata kunci “petani” di Bale Bengong, akan tampil 479 berita yang mengulas tema petani dari berbagai sudut pandang. Ada kisah tentang petani sukses, tentang nasib petani di tengah pandemi, masalah benih yang sering menyulitkan petani, dan upaya regenerasi petani.

**Tabel 3. Contoh Isu Petani di Bale Bengong**

No	Judul	Terbit
1	Jalan Terjal Kedaulatan Benih bagi Petani	18/3/2021
2	Regenerasi Petani Kakao Jembrana Terancam Mati	7/11/2019
3	Petani Muda Mengani Tetap Bergairah di Tengah Pandemi	7/4/2021
4	Petani Bekul Super Jadi Panutan di Buleleng	11/10/2021

Sumber: dokumen peneliti

Bahasan lain yang muncul di Bale Bengong adalah terkait transgender dan LGBT. Kaum transgender dan LGBT kerap terpinggirkan di tengah masyarakat. Di

media massa arus utama, berita-berita mengenai mereka jarang sekali yang bernada positif. Seperti layaknya kaum marginal lain, transgender dan LGBT hanya hadir di media arus utama jika ada tragedi, itu pun digambarkan dalam bahasa yang penuh olok-olok. Oleh Bale Bengong, transgender dihadirkan lewat berbagai perspektif, layaknya manusia biasa. Mulai dari isu kesehatan, lomba kecantikan, kesenian tradisional yang melibatkan transgender, hingga kegiatan sosial.

**Tabel 4. Contoh Isu Transgender dan LGBT di Bale Bengong**

No	Judul	Terbit
1	Tari Gandung Sepi Penerus, Legong Muani Kian Digemari	16/7/2017
2	Perjalanan Panjang Yayasan Gaya Dewata untuk Sadar Kesehatan	22/2/2022
3	Miss Queen Indonesia: Perjuangan untuk Setara	19/11/2021
4	Urun Daya Sesama untuk Membantu Waria	31/5/2020

Sumber: dokumen peneliti

Terakhir, topik yang muncul adalah terkait buruh. Salah satu yang hadir di masyarakat tetapi isunya selalu terpinggirkan adalah buruh. Di media massa, isu-isu buruh umumnya dihadirkan dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang pemerintah, pengusaha, maupun otoritas. Kedua, dari sudut pandang serikat buruh. Sementara kisah-kisah dari buruhnya itu sendiri,

terutama buruh yang tidak tergabung dalam organisasi karena bekerja di sektor informal, jarang sekali terdengar. Di Bale Bengong, kisah-kisah tentang buruh dari berbagai perspektif dihadirkan. Rata-rata mengungkap isu tentang buruh dari sudut pandang buruhnya itu sendiri. Tak heran jika perspektif pemberitaan pun banyak menghadirkan demo buruh, derita buruh, dan kisah-kisah mereka sebagai kaum marginal.

**Tabel 5. Contoh Isu Buruh di Bale Bengong**

No	Judul	Terbit
1	Dua Buruh Itupun Tertindas hingga Eksekusi	15/6/2019
2	Bulan Puasa, Buruh Bangunan Bali Meningkat	26/8/2009
3	Sumini, Perempuan Albino Buruh Kuli	7/3/2011
4	Suka Duka Pekerja Pariwisata Informal Selama Pandemi	8/11/2021

Sumber: dokumen peneliti

### Konsep Fifth Estate di Bale Bengong

Dutton (2009) menyebutkan terdapat lima strategi dalam konsep *fifth estate* yaitu 1) *searching*, 2) *creating*, 3) *distributing/leaking*, 4) *networking*, dan 5) *collective intelligence*.

*Searching* yang dimaksud Dutton (2009) adalah mencari isu, problema maupun fakta melalui internet dan media sosial. Hal ini bisa juga dilakukan dengan cara langsung, yakni masyarakat awam mencari isu, problema dan fakta di lapangan. Hal ini sudah dilakukan Bale Bengong karena melalui jurnalisme warga,

perspektif yang dihadirkan merupakan perspektif warga yang menjadi penulis artikel itu sendiri. Mereka bisa mencari tahu seputar isu maupun problema yang menarik menurut mereka, mengumpulkan fakta-faktanya secara personal, sebelum menuangkannya ke dalam artikel.

Setelah mengumpulkan fakta di lapangan secara personal, para masyarakat pelaku jurnalisme warga di Bale Bengong kemudian menuliskan hasilnya dalam bentuk artikel maupun foto. Ini sesuai dengan strategi kedua dalam konsep *fifth estate* yaitu *creating*. Dutton (2009) menyebutkan, dalam strategi ini, tiap-tiap individu menciptakan konten kreasi mereka sendiri. Salah satu contoh yang selaras adalah video penganiayaan George Floyd oleh petugas polisi yang lantas membunuhnya, yang direkam oleh Darnella Frazier.

Dutton (2009) menyebut pendistribusian atau pembocoran informasi sebagai strategi ketiga dalam konsep *fifth estate*. Dalam strategi ini, para penulis artikel maupun foto/video berbasiskan jurnalisme warga kemudian mengirimkan karya mereka ke Bale Bengong. Tim redaksi Bale Bengong kemudian mengkurasi, mengedit agar karya-karya yang masuk tidak mengandung berita palsu atau *hoax*, lalu menerbitkannya di portal berita tersebut.

Strategi dalam *fifth estate* berikutnya adalah *networking* atau berjejaring. Strategi ini dilakukan oleh Bale Bengong dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggelar pelatihan jurnalisme warga untuk masyarakat awam, terutama masyarakat marginal.

*(Pelatihan jurnalisme warga) Itu kegiatan utama. Hasilnya pasti ada karya dari mereka usai pelatihan, anak muda tahu cara menulis sesuai fakta dan verifikasi, dan terus berjejaring (Luh De, wawancara melalui email, 29 Mei 2022).*

*Collective intelligence* atau kecerdasan kolektif merupakan kecerdasan bersama atau kelompok yang muncul dari kolaborasi, upaya kolektif, dan persaingan banyak individu dan muncul dalam pengambilan keputusan bersama-sama. Untuk strategi ini, Bale Bengong telah melakukannya baik itu melalui jurnalisme warga maupun berkolaborasi dengan sesama media independent dan alternatif seperti Project Multatuli, Konde, dan Bandung Bergerak (Utami, 2022). Dengan kolaborasi seperti ini, isu-isu seputar kaum marginal bisa lebih bergaung hingga ke berbagai pelosok nusantara, bahkan dunia.

Pemimpin Redaksi Bale Bengong mengakui bahwa pendirian media tersebut memang diawali oleh keinginan untuk memberi ruang pada warga yang tidak banyak mendapat tempat di media arus utama, terutama masyarakat pedesaan dan komunitas marginal. Untuk isu yang ditampilkan, ia membebaskan kepada para penulis. Tim redaksi Bale Bengong hanya berfungsi sebagai *gatekeeper* yang menyortir berita dari fitnah, berita palsu, dan *hoax*.

*(Fokus dan tema kami) Apa saja terkait Bali, tidak harus orang Bali atau tinggal di Bali. (Kami sebagai redaksi hanya) mengedit dan menyortir artikel yang tidak mengandung fitnah dan SARA, serta memiliki identitas penulis yang jelas (Luh De, wawancara melalui email, 29 Mei 2022).*

Kehadiran tim redaksi sebagai *gatekeeper* ini berguna untuk mengatasi masalah klasik yang umumnya dihadapi media yang berbasiskan jurnalisme warga. Media-media tersebut umumnya 'terjebak dalam kekhawatiran seputar keaslian, kredibilitas, dan kontroversi' (Banda, 2009) di mana laporan yang tidak etis atau palsu dapat diunggah oleh penulis anonim untuk menimbulkan kebencian, memicu kemarahan, atau menimbulkan protes. Meski anonimitas atau penggunaan nama samaran sangat penting dalam kasus-kasus di mana keamanan jurnalis warga mungkin terganggu, namun beberapa sarjana berpendapat bahwa orang bersembunyi di balik identitas palsu untuk mengunggah komentar jahat yang menunjukkan kurangnya kesopanan (McEnroy 2013).

Kemudian, Bale Bengong sebagai media berbasiskan jurnalisme warga memang menyediakan ruang alternatif dan mendorong masyarakat untuk secara kritis menuliskan dan memberikan informasi terkait isu-isu kaum marginal. Melalui portal berita ini, masyarakat awam maupun kaum marginal kemudian membentuk jaringan sebagai bentuk solidaritas untuk mendistribusikan akuntabilitasnya.

Dalam pemberitaan tentang disabilitas, misalnya, sudut pandang yang dihadirkan amat lengkap, baik dari masyarakat awam maupun kaum disabilitas itu sendiri. Ini membuktikan bahwa masyarakat yang terlibat dalam pemberitaan di Bale Bengong maupun para pembacanya dapat memvalidasi dan menilai kredibilitas informasi yang disebarkan dengan cara membandingkan dan saling melengkapi melalui berbagai sumber, pengalaman pribadi atau orang

lain. Realita ini jarang diangkat di media arus utama yang cenderung memberitakan disabilitas dari sudut pandang otoritas dan pihak ketiga.

Bale Bengong melakukan mirip dengan yang dilakukan para pendiri Oh My News di Korea maupun portal newzimbabwe.com di Zimbabwe. Dalam kedua contoh portal berita jurnalisme warga itu, jurnalisme warga dianggap sebagai sebuah bentuk *storytelling*, yang mengubah sudut pandang jurnalisme dari sebuah ceramah menjadi sebuah percakapan (Marchionni, 2013), di mana 'orang biasa' (Allan, 2009) mengambil alih cerita dan berpengaruh dalam menceritakan kisah mereka dari perspektif mereka sendiri, melalui blog, komentar pembaca, maupun email. Dalam contoh Newzimbabwe.com, portal tersebut memungkinkan pembaca untuk mengirim komentar yang, sampai batas tertentu, menunjukkan pemahaman pembaca tentang masalah dan minat mereka untuk menambahkan dimensi/perdebatan tertentu yang mungkin diabaikan dalam tulisan cerita. Komentar-komentar ini biasanya tidak tunduk pada kerasnya kualitas yang merupakan karakteristik jurnalisme tradisional seperti objektivitas dan verifikasi (Mpofu, 2015).

Oleh karena itu, Bale Bengong juga berfungsi sekaligus menjadi ruang arus baru bagi para masyarakat marginal untuk menyuarakan isu-isu yang mereka hadapi. Media ini sekaligus menjadi sarana untuk membangun kesadaran masyarakat akan adanya dan pentingnya isu-isu seputar kaum marginal. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, atau tepatnya masyarakat Bali, suara mereka berhak untuk didengarkan, tidak melulu

terbungkam. Tidak heran jika kemudian Bale Bengong dinilai positif oleh sebagian besar warga Bali, bahkan dianggap sebagai etalase suara warga.

*(Oleh masyarakat Bali) Kami dinilai kredibel, independen, dan salah satu sumber informasi alternatif (Luh De, wawancara melalui email, 29 Mei 2022).*

Untuk mendorong pelibatan masyarakat marginal dalam jurnalisme warga, Bale Bengong tidak hanya menunggu mereka mengirimkan artikel. Bale Bengong juga melakukan partisipasi aktif dengan menggelar pelatihan jurnalisme warga kepada masyarakat awam, terutama kaum marginal. Dengan demikian, masyarakat bisa terus membantu menyuarakan isu-isu tentang kaum marginal yang tidak ada di media arus utama, sehingga isu tersebut bisa mendapatkan perhatian dan hadir di masyarakat.

Saat ini, tantangan terbesar Bale Bengong adalah memastikan stabilnya pasokan berita dan konten serta mendorong masyarakat untuk terus menulis dan tidak takut pada UU ITE. Maklum, sebagai media alternatif berbasis jurnalisme warga, para penulis Bale Bengong tidak dilindungi oleh Kode Etik Jurnalistik. Itu pula yang menyebabkan hingga kini Bale Bengong belum terdaftar di Dewan Pers.

*Belum (jadi anggota Dewan Pers). Pernah coba daftar tapi tidak bisa karena formulirnya untuk perusahaan pers komersil (Luh De, wawancara melalui email, 29 Mei 2022).*

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *fifth estate* dapat ditemukan dalam media Bale Bengong yang mengusung konsep jurnalisme warga. Para penulis yang berasal dari beragam latar belakang berkumpul dan membentuk jaringan dengan menulis di Bale Bengong, sebagai awalan terbentuknya *fifth estate*. Mereka berkumpul tidak hanya menulis dan berdiskusi, tetapi juga melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah dan regulasi terkait masalah tentang kaum marginal.

Ke depan diharapkan media alternatif berbasis jurnalisme warga bisa mencontoh gerakan yang dilakukan Bale Bengong. Sebab, di tengah resistensi para jurnalis profesional atas konsep jurnalisme warga yang dinilai tidak memenuhi kaidah jurnalistik, Bale Bengong mampu membuktikan bahwa jurnalisme warga bisa memberikan informasi lebih kaya mengenai isu-isu yang jarang diangkat media massa arus utama.

Format jurnalisme warga yang dipadukan dengan jurnalisme profesional menarik untuk dikaji lebih lanjut, baik dalam ranah akademis maupun praktis. Dalam ranah praktis, format gabungan ini memungkinkan media menghadirkan berita-berita lebih beragam dan jujur dari perspektif para warga, sekaligus meminimalkan munculnya berita palsu maupun *hoax* karena adanya proses *gatekeeping* dari para jurnalis profesional yang memahami kode etik jurnalistik.

Sementara di ranah akademis, format gabungan antara jurnalisme warga dan jurnalisme profesional seperti Bale Bengong

menarik untuk dikaji karena konsep *fifth estate* sendiri masih baru dan belum banyak penelitian yang menggabungkan dua konsep ini, terutama dalam konteks Indonesia. Padahal, iklim media di Indonesia yang dinamis tentunya sangat menarik untuk dianalisis, terutama dengan dua konsep tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, J. Y. (2017). Tensions in the scholarship on participatory journalism and citizen journalism. *Annals of the International Communication Association*, 41(3–4), 278–297. <https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1350927>
- Allan, S. (2003). Mediating citizenship: On-line journalism and the public sphere new voices. *Development*, 46(1), 30–40.
- Allan, S. (2013). *Citizen witnessing: Revisioning journalism in times of crisis*. Cambridge: Polity Press.
- Bale Bengong. (2007). *Tentang Kami*. BaleBengong. <https://balebengong.id/mengenai-kami/>
- Banda, F. (2010). *Citizen journalism and democracy in Africa: An exploratory study*. Grahamstown: Highway Africa.
- Cohen, L., & Manion, L. (1994). *Research methods in education 4th edition* Routledge. London.
- Cottle, S. (2009). Series Editor's Preface: Global crises and the media. *Climate Change and the Media*, viii–xii.
- Council, O. E. (1950). European Convention on human rights. *Council of Europe*

- Secretary GENERAL. Online: Http://Www. Echr. Coe. Int/Documents/Convention\_ENG. Pdf.*
- Creswell, J. W. (2003). A framework for design. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 9–11.
- Dutton, W. (2009). The fifth estate emerging through the network of networks. *Prometheus (United Kingdom)*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/08109020802657453>
- Dutton, W. (2015). The Internet's Gift to Democratic Governance: The Fifth Estate. *Can the Media Serve Democracy?: Essays in Honour of Jay G. Blumler*, 164–173. [https://doi.org/10.1057/9781137467928\\_15](https://doi.org/10.1057/9781137467928_15)
- Felle, T. (2016). Digital watchdogs? Data reporting and the news media's traditional "fourth estate" function. *Journalism*, 17(1), 85–96. <https://doi.org/10.1177/1464884915593246>
- Gunadha, R., & Bhayangkara, C. S. (2020). Remotivi: Suara.com dan 9 Media Daring Paling Inklusif ke Kelompok Marginal. *Suara*. <https://www.suara.com/news/2020/12/15/153928/remotivi-suaracom-dan-9-media-daring-paling-inklusif-ke-kelompok-marginal>
- Heychael, M., Rafika, H., Adiprasetyo, J., & Arief, Y. (2021). *Komunitas Agama Marginal dalam Media di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*. [https://www.remotivi.or.id/images/research/1632543503.BahasaIndonesia\\_IMS\\_Remotivi\\_Komunitas\\_Agama\\_Marginal\\_dalam\\_Media\\_di\\_Indonesia.pdf](https://www.remotivi.or.id/images/research/1632543503.BahasaIndonesia_IMS_Remotivi_Komunitas_Agama_Marginal_dalam_Media_di_Indonesia.pdf)
- Holt, K., & Karlsson, M. (2015). "Random acts of journalism?": How citizen journalists tell the news in Sweden. *New Media & Society*, 17(11), 1795–1810.
- Holton, A. E., Coddington, M., & Gil de Zúñiga, H. (2013). Whose news? Whose values? Citizen journalism and journalistic values through the lens of content creators and consumers. *Journalism Practice*, 7(6), 720–737.
- Karlsson, M., & Holt, K. (2014). Is anyone out there? Assessing Swedish citizen-generated community journalism. *Journalism Practice*, 8(2), 164–180.
- Kim, J., & Kim, H. (2017). The Authority of Newspapers and the Citizen Participation in Online Public Journalism. *International Information Institute (Tokyo). Information*, 20(9B), 6727–6734. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/authority-newspapers-citizen-participation-online/docview/2021240632/se-2?accountid=17242>
- Larsson, S. (2014). Battling mainstream media, commentators and organized debaters: Experiences from citizens' online opinion writing in Sweden. *Nordicom Review*, 35(2), 77–89.
- Luce, A., Jackson, D., & Thorsen, E. (2017). Citizen Journalism at The Margins. *Journalism Practice*, 11(2–3), 266–284. <https://doi.org/10.1080/17512786.2016.1222883>
- Marchionni, M.D. (2013). Journalism-as-a-conversation: A concept

- explication. *Communication Theory* 23(2): 131–147.
- McEnroy, K. (2013). Where old (gatekeepers) meets new (media): Herding reader comments into print. *Journalism Practice* 7(6): 755–771.
- Mertens, D. M. (2019). *Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods*. Sage publications.
- Mortensen, M. (2011). The eyewitness in the age of digital transformation. *Amateur Images and Global News*, 63–75.
- Mpofu, S. (2015). When the subaltern speaks: citizen journalism and genocide ‘victims’ voices online. *African Journalism Studies*, 36(4), 82–101. <https://doi.org/10.1080/23743670.2015.1119491>
- Nip, J. Y. M. (2006). Exploring the second phase of public journalism. *Journalism Studies*, 7(2), 212–236.
- Örnebring, H. (2013). Anything you can do, I can do better? Professional journalists on citizen journalism in six European countries. *International Communication Gazette*, 75(1), 35–53.
- Puspitasari, M. A. (2016). Banjir Informasi, Media Kehilangan Fungsi Kontrol Sosial. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/753160/banjir-informasi-media-kehilangan-fungsi-kontrol-sosial/full&view=ok>
- Robertson, C. T., Dutton, W. H., Ackland, R., & Peng, T. Q. (2019). The democratic role of social media in political debates: The use of Twitter in the first televised US presidential debate of 2016. *Journal of Information Technology and Politics*, 16(2), 105–118. <https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1590283>
- Schultz, J. (1998). *Revising the fourth estate : democracy, accountability, and the media*. 304.
- Sejuk. (2021). Membangun Media sebagai Ruang Aman Kelompok Marginal di Nusa Tenggara Barat. *Sejuk*. <https://sejuk.org/2021/10/23/membangun-media-sebagai-ruang-aman-kelompok-marginal-di-nusa-tenggara-barat/>
- Semati, M., & Brookey, R. A. (2014). Not for Neda: Digital media,(citizen) journalism, and the invention of a postfeminist martyr. *Communication, Culture & Critique*, 7(2), 137–153.
- Setoutah, S., Jeljeli, R., & Farhi, F. (2021). Citizen-Journalist Dilemma Between Media Freedom and Professionalism. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(1), 394–406. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27966119037>
- Thaniago, R. (2020). *Laporan Riset Indeks Media Inklusif 2020*.
- Utami, E. (2022). Dead Press Society: Gerilya Media Indie Bersekutu Menjaga Demokrasi. *Konde*. <https://www.konde.co/2022/05/dead-press-society-gerilya-media-indie-bersekutu-menjaga-demokrasi.html/>
- Uwalaka, T., & Watkins, J. (2018). Social Media as the Fifth Estate in Nigeria: An Analysis of the 2012 Occupy

Nigeria Protest. *African Journalism Studies*, 39(4), 22–41. <https://doi.org/10.1080/23743670.2018.1473274>

Wall, M. (2015). Citizen Journalism. *Digital Journalism*, 3(6), 797–813. <https://doi.org/10.1080/21670811.2014.1002513>